



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa yang direncanakan secara strategis yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan penyusunan rencana pembangunan di desa yang terintegrasi dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, perlu adanya pedoman teknis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 105);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 107);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis, selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) RPJM Desa disusun untuk periode waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Pohuwato yang berlaku.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) RPJMDes disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Pohuwato.
- (5) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kepala Desa dilantik.
- (6) RPJMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) RPJMDes sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terlebih dahulu harus dievaluasi oleh pemerintah kabupaten pohuwato melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (8) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah pemerintah desa secara resmi menyampaikan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah c.q Kepala Bappeda yang dilampiri dokumen RPJMDes. Berdasarkan surat tersebut Bappeda akan menjadwalkan evaluasi dengan mengundang Pemerintah desa dan Tim penyusun RPJMDes serta SKPD terkait. Segala konsekuensi biaya pertemuan untuk evaluasi menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

- (9) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas hari kerja) hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan, maka RPJMDes dianggap selesai dan pemerintah desa bersama-sama BPD dapat menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDes.
- (10) Tata cara penyusunan RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)

Pasal 3

- (1) RKPDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa periode satu tahun mulai dari bulan januari sampai bulan desember yang merupakan penjabaran dari RPJMDes.
- (2) RKPDes memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Sistematika RKPDes paling sedikit berisi uraian :
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kejasama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi Gorontalo dan pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
 - e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (4) RKPDes disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.
- (5) RKPDes mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan
- (6) RKPDes ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan september tahun berjalan.

- (7) RKPDes menjadi dasar penetapan APBDesa.
- (11) Tata cara penyusunan RKP Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Bappeda dan SKPD terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa.

Pasal 5

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi pemberian pedoman, pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa.
- (3) Pembinaan, bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ^{pebel}05 dilakukan pula oleh kecamatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PEMEKARAN ATAU KELURAHAN YANG BERALIH MENJADI DESA

Bagian Kesatu

Desa Pemekaran

Pasal 7

- (1) Pelaksana Tugas Kepala Desa atau kepala desa terpilih untuk desa pemekaran menyusun rancangan RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada RPJM Desa induk.
- (3) Pedoman pada RPJM Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu mengacu pada identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKP Desa tahun lalu dalam wilayah administratif desa yang baru terbentuk.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun prioritas, lokasi, dan sasaran pembangunan desa serta rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan desa
- (5) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar penyusunan APBD Desa

Bagian Kedua

Kelurahan menjadi Desa

Pasal 8

- (1) Pelaksana Tugas Kepala Desa atau kepala desa terpilih untuk kelurahan yang berubah status menjadi desa menyusun rancangan RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Strategis Kelurahan sebelum berubah status menjadi desa.

- (3) Pedoman Renstra Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu mengacu pada identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKP Kelurahan tahun lalu.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun prioritas, lokasi, dan sasaran pembangunan desa serta rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan desa.
- (5) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa sebagai dasar penyusunan APBD Desa.

BAB V

REVISI RPJM DESA DAN MASA TRANSISI

Bagian Kesatu

Revisi RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Dokumen RPJM Desa yang berakhir Tahun 2014 dengan masa jabatan pemerintahan kepala desa masih tersisa diatas 2 (dua) tahun terhitung yang dijalankan saat ini, melakukan Revisi RPJM Desa.
- (2) Revisi RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada sistematika RPJM Desa baru yang menjadi lampiran perbup ini.
- (3) Dokumen RPJM Desa yang berakhir Tahun 2014 dengan masa jabatan pemerintahan kepala desa masih tersisa dibawah 2 (dua) tahun terhitung yang dijalankan saat ini, tidak melakukan ~~merevisi~~ RPJM Desa.
- (4) Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyusun Rancangan Awal RPJM Desa untuk periode pemerintahan desa selanjutnya dengan mengacu pada sistematika RPJM Desa baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini sebelum masa pemerintahan berakhir.

- (5) Revisi RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penyusunan Rancangan Awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu melakukan evaluasi dokumen RPJM Desa yang telah habis masa berlakunya menurut ketentuan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Masa Transisi

Pasal 10

- (1) Masa transisi adalah desa yang periode dokumen RPJM Desa telah berakhir sementara dokumen RPJM Desa yang baru belum memiliki kekuatan hukum untuk menjadi acuan penyusunan RKP Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan RKP Desa masih berpedoman pada RPJM Desa tahun sebelumnya.
- (3) Pedoman RPJM Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKP Desa tahun lalu.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun prioritas, lokasi, dan sasaran pembangunan desa serta rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan desa dalam bentuk dokumen RKP Desa
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar penyusunan APBD Desa

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

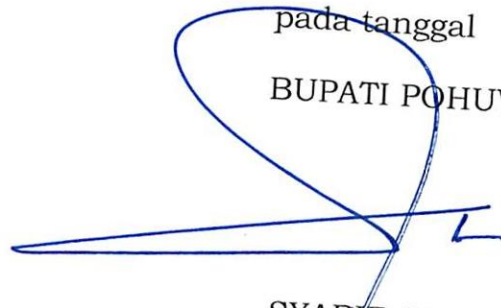
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM
NIP.196005031986021007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA KABUPATEN
POHUWATO

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)

1. Halaman Depan RPJM Desa

Pada halaman depan (cover) RPJMD Desa memuat informasi seperti contoh berikut.

Contoh Format

| |
|---|
| <p>Logo Desa</p> <p>RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)</p> <p>DESA.....TAHUN 20.... - 20....</p> <p>KECAMATAN.....</p> <p>KABUPATEN</p> <p>PROVINSI.....</p> |
|---|

2. Sistematika RPJMDesa terdiri desa adalah sebagai berikut :

Halaman Judul

Peraturan Desa tentang RPJM Desa

Kata Pengantar

Daftara Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Desa

Bab III. gambaran pengelolaan keuangan desa

Bab IV. analisis isu-isu srategis;

Bab V. visi, misi, tujuan dan sasaran;

Bab VI. strategi dan arah kebijakan;

Bab VII. kebijakan umum dan program pembangunan desa;

Bab VIII. indikasi rencana program prioritas Desa

Bab IX. penetapan indikator kinerja desa.

Bab X. Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan

Lampiran-Lampiran :

Lampiran 1. Dokumen Visi dan Misi Kepala Desa saat mencalonkan diri

Lampiran 2. Hasil-hasil Pengkajian Desa

Lampiran 3. SK Tim Penyusun RPJM Desa

3. Secara teknis penyusunan bab per bab adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJM Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJM Desa, proses penyusunan RPJM Desa, kedudukan RPJM Desa tahun rencana, keterkaitan antara dokumen RPJM Desa dengan dokumen RPJMD Kabupaten.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Desa, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJM Desa.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJM Desa dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: Rencana tata ruang Desa, RPJMD Kabupaten dan juga Renstra SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJM Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa bagi desa yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJM Desa bagi desa yang bersangkutan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi desa yang meliputi aspek

geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah Desa.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Data dan informasi kondisi umum daerah sekurang-kurangnya mencakup:

1. Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:

- 1) Sejarah desa
- 2) Struktur Pemerintahan Desa
- 3) Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa
- 4) Luas dan batas wilayah administrasi
- 5) Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:
 - a) Posisi astronomis
 - b) Posisi geostrategis
 - c) Kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
 - (1) Pedalaman
 - (2) Terpencil
 - (3) Pesisir
 - (4) Pegunungan
 - (5) Kepulauan
- 6) Topografi, antara lain terdiri dari:
 - a) Kemiringan lahan
 - b) Ketinggian lahan
- 7) Geologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Struktur dan karakteristik
 - b) Potensi kandungan
- 8) Hidrologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Daerah Aliran Sungai
 - b) Sungai, danau dan rawa
 - c) Debit
- 9) Klimatologi, antara lain terdiri dari:
 - a) Tipe
 - b) Curah hujan
 - c) Suhu
 - d) Kelembaban
- 10) Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
 - a) Kawasan budidaya
 - b) Kawasan lindung

b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada

rencana tata ruang wilayah. Penyajian data mengacu pada contoh tabel berikut :

Contoh Tabel potensi desa 2014

| No | Uraian | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C |
|----|--------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| | Contoh | | | | |
| 1 | Potensi perikanan air tawar (Hektar) | 14 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | Potensi tanaman kakao | 21 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Dsb.... | | | | |

Catatan : Dsb artinya masukkan potensi-potensi lain yang ada di desa selengkap-lengkapny sesuai kondisi desa.

c. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Penyajian data mengacu pada contoh tabel berikut :

Contoh Tabel bencana alam 2014

| No | Uraian | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C |
|----|-------------------------------|------|---------|---------|---------|
| | Contoh | | | | |
| 1 | Wilayah rawan banjir (Hektar) | 14 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | Abrasi (km) | 21 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Dsb.... | | | | |

Dsb....artinya lanjutkan pengisian sesuai kondisi desa.

d. Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Penyajian data mengacu pada contoh tabel berikut :

Contoh Tabel Demografi tahun 2014

| No | Uraian | DESA | Dusun A | Dusun B | Dusun C |
|----|--------------------|------|---------|---------|---------|
| | Contoh | | | | |
| 1 | Jumlah Penduduk | 14 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | Penduduk laki-laki | 21 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Penduduk perempuan | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|
| 4 | Penduduk agama islam | | | | |
| 5 | Penduduk pendidikan SD | | | | |
| 6 | Dsb..... | | | | |

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|---------------------------------|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah penduduk yang miskin | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| 2 | Angka kriminalitas yang terjadi | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|---|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 3 | Jumlah penduduk yang buta huruf | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 5 | Persentase balita gizi buruk | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 6 | Persentase penduduk | 2010 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | yang memiliki lahan | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 7 | Persentase penduduk yang bekerja | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|--------------------------|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 8 | Jumlah grup kesenian | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 9 | Jumlah gedung olahraga | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 10 | Jumlah klub olahraga | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 11 | Jumlah lapangan olahraga | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|--|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Angka Partisipasi Murni PAUD/TK | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

b. Pendidikan Dasar

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|---|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata PAUD/TK | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD sederajat | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 3 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|--|
| | | 2014 | | | | | |
| 4 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 5 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 8 | Sekolah pendidikan PAUD/TK kondisi bangunan baik | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

c. Pendidikan Menengah

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|---|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Angka Putus Sekolah SMA Sederajat | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.2. Kesehatan

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|--|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah Posyandu | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Jumlah kunjungan Bayi/balita ke posyandu | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 4 | Jumlah kunjungan ibu hamil ke posyandu/puskesmas/Pustu | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 4 | Jumlah bidan | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 5 | Jumlah Balita Gizi Buruk | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 10 | Jumlah gizi buruk mendapat perawatan | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|--|--|--|--|--|
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2015 | | | | | |
| 11 | Jumlah balita gizi kurang | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 12 | Jumlah balita gizi kurang yang mendapat perawatan | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 13 | Jumlah RT memiliki Jamban | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 14 | Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 15 | Jumlah angka kematian ibu (AKI) | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.3. Pekerjaan Umum

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|---|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km) | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Presentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (Km) | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 3 | Jumlah tempat ibadah | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 4 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 5 | Jumlah tempat pembuangan sampah | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|--|
| | | 2014 | | | | | |
| 6 | Persentase rumah layak huni | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 7 | Panjang jalan dilalui Roda 4 (km) | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 8 | Luas Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 9 | Luas Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 8 | Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 9 | Luas Lingkungan Pemukiman | 2010 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|--|--|--|--|--|
| | kumuh | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 10 | Jumlah Rumah Tangga yang Tersedia Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 11 | Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 12 | Tersedianya Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 liter/orang/hari | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 13 | Rumah Tangga yang Tersedia Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.4. Perencanaan Pembangunan

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Thn 2010 | Thn 2011 | Thn 2012 | Thn 2013 | Thn 2014 |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Tersedianya dokumen Perencanaan RPJM Desa yang telah di perdeskan | | | | | |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKP Desa yang diperdeskan/perkades | | | | | |
| 3 | Tersedian Dokumen APB Desa yang ditetapkan dengan perdes | | | | | |
| 4 | Tersedia dokumen LKPJ Kepala Desa | | | | | |
| 5 | Tersedia dokumen LPP Desa | | | | | |
| 6 | Rencana Umum tata ruang desa | | | | | |

2.3.5. Pertanian

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|---|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Persentase Rumah tangga yang memiliki lahan bersertifikat | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Persentase Rumah tangga yang tidak memiliki tanah sebagai lahan pertanian/usaha | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.6. Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|---|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Persentase penduduk yang ber KTP Nasional | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Persentase bayi berakte kelahiran | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 3 | Persentase pasangan berakte menikah | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|--|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 3 | Jumlah tenaga kerja perempuan | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | | 2014 | | | | | |
| 4 | Jumlah kasus kekerasan pada anak | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|------------------------------------|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Jumlah peserta KB Aktif | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 3 | Jumlah petugas KB | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.9. Sosial

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|----------------------------|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Persentase anak cacat yang | 2010 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|--|--|--|
| | memperoleh bantuan | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Persentase lansia yang memperoleh bantuan | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 3 | Persentase warga miskin yang mendapat bantuan | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

Jika ada masalah sosial lainnya bisa ditambahkan pada format ini.

2.3.10. Ketenaga Kerjaan

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|---|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah penganggur | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja per tahun | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.11. Koperasi, Usaha kecil Dan Menengah.

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|---------------------------|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Persentase koperasi aktif | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Jumlah UMKM | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.12. Kebudayaan

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|---|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.13. Kepemudaan dan Olahraga

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|----------------------------|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah organisasi pemuda | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Jumlah organisasi olahraga | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 3 | Jumlah kegiatan kepemudaan | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 4 | Jumlah kegiatan olahraga | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 5 | Jumlah Lapangan olahraga | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C | Dusun D |
|----|--|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Desa | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 3 | Rata-rata Presentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 8 | Jumlah lembaga yang terbentuk untuk Pemeliharaan/keberlanjutan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |
| 9 | Jumlah taman bacaan desa/perpustakaan desa | 2010 | | | | | |
| | | 2011 | | | | | |
| | | 2012 | | | | | |
| | | 2013 | | | | | |
| | | 2014 | | | | | |

2.3.15. Statistik

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Thn 2010 | Thn 2011 | Thn 2012 | Thn 2013 | Thn 2014 |
|----|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Buku Profil desa | | | | | |
| 2 | | | | | | |

2.3.16. Komunikasi dan Informatika

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C |
|----|--|-------|------|---------|---------|---------|
| 1 | Persentase jangkauan jaringan komunikasi HP/Telpon | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| 2 | Jumlah warnet | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| 3 | Jumlah surat kabar nasional/local | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| 4 | Jumlah penyiaran radio/TV local | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| 5 | Website milik pemerintah desa | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|--|--|--|
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| 6 | Persentase Rumah Tangga yang terjangkau TV/TV Kabel | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| 7 | Persentase Rumah tangga yang menikmati siaran radio | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |

Urusan Pilihan

1. Pertanian/Perikanan/Perkebunan/Peternakan

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C |
|----|--|-------|------|---------|---------|---------|
| 1 | Produksi Jagung (ton) | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| 2 | Dsb....(produksi komoditi sesuai potensi desa) | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| 3 | Jumlah kelompok tani jagung | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|
| | | 2014 | | | | |
| 4 | Dsb....(Jumlah kelompok sesuai potensi desa) | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |

2. Kehutanan

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Thn 2010 | Thn 2011 | Thn 2012 | Thn 2013 | Thn 2014 |
|----|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Kerusakan Kawasan Hutan | | | | | |

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Tahun | Desa | Dusun A | Dusun B | Dusun C |
|----|--|-------|------|---------|---------|---------|
| 1 | Pertambangan tanpa ijin | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| 2 | Jumlah rumah tangga yang belum menikmati listrik | 2010 | | | | |
| | | 2011 | | | | |
| | | 2012 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2014 | | | | |

2.4. Aspek Daya Saing Desa

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Desa

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Thn 2010 | Thn 2011 | Thn 2012 | Thn 2013 | Thn 2014 |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | | | | | |

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Thn 2010 | Thn 2011 | Thn 2012 | Thn 2013 | Thn 2014 |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Luas wilayah produktif | | | | | |
| 2 | Luas wilayah industri | | | | | |
| 3 | Luas wilayah banjir | | | | | |
| 4 | Luas wilayah kekeringan | | | | | |
| 5 | Luas wilayah perkotaan | | | | | |
| 6 | Jenis dan jumlah bank dan cabang | | | | | |
| 7 | Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang | | | | | |
| 8 | Jenis, kelas, dan jumlah restoran | | | | | |
| 9 | Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel | | | | | |
| 10 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | | | | | |

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Untuk pengisian data pada indikator ini mengacu pada contoh tabel berikut ini :

| No | Indikator | Thn 2010 | Thn 2011 | Thn 2012 | Thn 2013 | Thn 2014 |
|----|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Persentase jumlah warga lulus SMA | | | | | |
| 2 | Persentase jumlah warga lulus S1 | | | | | |
| 3 | Persentase jumlah warga lulus S2 | | | | | |

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

a. Pendapatan

Untuk poin tata cara pengisian dapat mengacu pada contoh matriks berikut ini :

| NO | URAIAN | TAHUN 2012 | TAHUN 2013 | PREDIKSI 2014 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | PENDAPATAN ASLI DESA | Rp 2.100.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.100.000 |
| | 1.1. Hasil Usaha Desa | | | |
| | 1.2. Hasil Kekayaan Desa | | Rp 3.700.000 | |
| | 1.3. Hasil swadaya dan partisipasi | | Rp 3.700.000 | |
| | 1.4. Hasil Gotong Royong | | | |
| | 1.5. Lain-lain Pend. Asli Desa. | Rp 750.000 | Rp 800.000 | Rp 1.000.000 |
| | Jumlah | | | |
| 2 | BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN | | | |
| | (1,0 % dari Retribusi Kabupaten) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH (ADD) | Rp150.000.000 | Rp210.000.000 | Rp219.000.000 |
| 4 | BANTUAN KEUANGAN | | | |
| | 1.1. Bantuan Pemerintah Pusat | | | |
| | 1.2. Bantuan Pemerintah Provinsi | | | Rp150.000.000 |
| | 1.3. Bantuan Pemerintah Kabupaten | Rp100.000.000 | Rp150.000.000 | Rp219.000.000 |
| | Jumlah | | | |
| 5 | HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA | | | |
| | 5.1. Hibah | | | |
| | 5.2. Sumbangan Pihak Ketiga | | | |
| | Jumlah | | | |
| | TOTAL JUMLAH | 250.000.000 | 300.000.000 | 400.000.000 |

b. Belanja

Kebijakan belanja desa dapat dilihat dari pelaksanaan APB Desa. Contoh untuk tahun 2012, 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

| Tahun Anggaran | Jenis Belanja | Jml Pagu | Realisasi | % |
|----------------|----------------------|----------------|--------------|------|
| 2012 | Belanja langsung | Rp 61.650.000 | | 100% |
| | Belanja Tdk Langsung | Rp 41.100.000 | | 100% |
| | Jumlah | Rp 102.750.000 | | |
| 2013 | Belanja langsung | Rp 81.188.125 | Rp 1.500.000 | |
| | Belanja Tdk Langsung | Rp 75.188.125 | Rp 4.625.000 | 100% |
| | Jumlah | Rp 156.376.250 | | |
| 2014 | Belanja langsung | Rp 153.974.444 | | |
| | Belanja Tdk Langsung | Rp 67.700.000 | | 100% |
| | Jumlah | Rp 221.674.444 | | |

3.2. Kerangka Pendanaan Kedepan

Kerangka pendanaan sangat menentukan proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 6 tahun yang akan datang. Proyeksi Kerangka pendanaan kedepan dapat berpijak dari kinerja keuangan desa sebelumnya. Poin dapat disusun seperti contoh tabel berikut ini :

Contoh Tabel

Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2015 – 2017

| NO | URAIAN | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | PREDIKSI 2017 |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | PENDAPATAN ASLI DESA | Rp 2.100.000 | Rp 3.100.000 | Rp 5.100.000 |
| | 1.6. Hasil Usaha Desa | | | |
| | 1.7. Hasil Kekayaan Desa | | Rp 3.700.000 | 3.000.000 |
| | 1.8. Hasil swadaya dan partisipasi | | Rp 3.700.000 | 5.000.000 |
| | 1.9. Hasil Gotong Royong | | | |
| | 1.10. Lain-lain Pend. Asli Desa. | Rp 750.000 | Rp 800.000 | Rp 1.000.000 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|
| | Jumlah | 2.850.000 | 13.300.000 | 14.100.000 |
| 2 | BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN | | | |
| | (1,0 % dari Retribusi Kabupaten) | | | |
| 3 | DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH (ADD) | Rp.800.000.000 | Rp800.000.000 | Rp800.000.000 |
| 4 | BANTUAN KEUANGAN | | | |
| | 1.4. Bantuan Pemerintah Pusat | | | |
| | 1.5. Bantuan Pemerintah Provinsi | | | Rp150.000.000 |
| | 1.6. Bantuan Pemerintah Kabupaten | Rp 300.000.000 | Rp 350.000.000 | Rp 400.000.000 |
| | Jumlah | 1.100.000.000 | 1.150.000.000 | 1.350.000.000,- |
| 5 | HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA | | | |
| | 5.1. Hibah | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| | 5.2. Sumbangan Pihak Ketiga | | | |
| | Jumlah | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| | TOTAL JUMLAH | 1.107.850.000 | 1.170.300.000 | 1.372.100.000 |

Contoh Tabel

Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2018 - 2020

| NO | URAIAN | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | PREDIKSI 2017 |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | PENDAPATAN ASLI DESA | Rp 3.100.000 | Rp 4.100.000 | Rp 6.100.000 |
| | 1.11. Hasil Usaha Desa | | | |
| | 1.12. Hasil Kekayaan Desa | | Rp 3.700.000 | 3.000.000 |
| | 1.13. Hasil swadaya dan partisipasi | | Rp 3.700.000 | 5.000.000 |
| | 1.14. Hasil Gotong Royong | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|
| | 1.15. Lain-lain Pend. Asli Desa. | Rp 750.000 | Rp 800.000 | Rp 1.000.000 |
| | Jumlah | 2.850.000 | 13.300.000 | 14.100.000 |
| 2 | BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN | | | |
| | (1,0 % dari Retribusi Kabupaten) | | | |
| 3 | DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH (ADD) | Rp.800.000.000 | Rp800.000.000 | Rp800.000.000 |
| 4 | BANTUAN KEUANGAN | | | |
| | 1.7. Bantuan Pemerintah Pusat | | | |
| | 1.8. Bantuan Pemerintah Provinsi | | | Rp150.000.000 |
| | 1.9. Bantuan Pemerintah Kabupaten | Rp 300.000.000 | Rp 350.000.000 | Rp 400.000.000 |
| | Jumlah | 1.100.000.000 | 1.150.000.000 | 1.350.000.000,- |
| 5 | HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA | | | |
| | 5.1. Hibah | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| | 5.2. Sumbangan Pihak Ketiga | | | |
| | Jumlah | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| | TOTAL JUMLAH | 1.108.850.000 | 1.171.300.000 | 1.373.100.000 |

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJM Desa karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 6 (enam) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan Desa dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa yang relevan yang berdasarkan

analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan desa pada Bab II (gambaran umum kondisi desa)

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

Contoh penyajian bisa dalam bentuk tabel berikut :

| No | Bidang | Permasalahan |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | <ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya SDM Aparatur desa dalam pengelolaan administrasi perkantoran, perencanaan dan penganggaran2. Tidak ada aula kantor desa3. Tidak ada kantor desa4. Kurangnya meja dan kursi5. Kurangnya tempat arsip6. Data belum berkualitas dan tersedia setiap saat.7. Ds.....(diisi sesuai hasil pengkajian kondisi desa) |
| 2 | Pelaksanaan pembangunan Desa | <ol style="list-style-type: none">1. Jalan antar pemukiman rusak2. Masih banyak warga yang tidak memiliki listrik3. Kurang MCK4. Air bersih belum menjangkau seluruh masyarakat5. Tingginya kerusakan hutan6. Dsb..... |
| 3 | Pembinaan kemasyarakatan Desa | <ol style="list-style-type: none">1. Masih tingginya kasus pencurian di desa2. Banyaknya kelembagaan desa yang tidak berfungsi dengan baik3. Tidak ada lapangan olahraga4. Kurangnya aktifnya lembaga adat5. Dsb..... |
| 4 | Pemberdayaan masyarakat Desa. | <ol style="list-style-type: none">1. Lahan tidur masih banyak2. Rendahnya produksi jagung3. Kurang alsintan |

| | | |
|--|--|---|
| | | 4. Masih banyak warga miskin yang membutuhkan modal usaha |
| | | 5. Kurang aktifnya kader pemberdayaan desa |
| | | 6. Dsb..... |

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan Desa maupun yang berasal dari antar desa, kebijakan kabupaten maupun provinsi. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap Desa tersebut.

Contoh penyajian isu berdasarkan permasalahan pembangunan diatas yakni:

1. Penyelenggara pemerintahan desa belum optimal
2. Rendahnya SDM
3. Infrastruktur desa belum merata
4. Kemiskinan masih tinggi
5. Kelembagaan desa belum berfungsi optimal
6. Pengelolaan SDA Belum optimal
7. Pelestarian lingkungan.

BAB V. PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJM Desa atau visi kepala terpilih
2. Uraian visi kepala Desa terpilih dan jangka waktunya; dan
3. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

Contoh : Visi Pembangunan Jangka Menengah

Dalam periode 2015-2020, Visi Pembangunan Desa XYZ adalah "Rakyat Desa XYZ Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa", sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di Desa XYZ secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Desa XYZ lebih sejahtera.

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci

Pada Visi kota XYZ 2015-2020 terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu Rakyat Desa XYZ Sejahtera serta Iman dan Taqwa. Kalimat "Rakyat Desa XYZ Sejahtera" adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta ditemukannya jati diri masyarakat Desa XYZ. "Iman dan Taqwa" merupakan persyaratan

mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemashlahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Kemajuan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan lainnya, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat sejahtera. Namun demikian, kemajuan ekonomi dapat menjadi tidak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang penuh magfiroh dari khalik-Nya, oleh karena itu pembangunan yang diarahkan untuk mencapai rakyat Desa XYZ Sejahtera harus dilandasi oleh Iman dan Taqwa sebagai ruh-nya.

Dalam rangka konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJM Desa, penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten Pohuwato

5.2. Misi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Maksud perumusan misi;
2. Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
3. Penjelasan masing-masing misi (jika ada).

Contoh .: Kejelasan Rumusan Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Rakyat Desa XYZ Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Desa XYZ 2007-2012” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan menuju tata pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan.
3. Memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas kesempatan kerja.
4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa XYZ.
5. Menjadikan masyarakat Desa XYZ yang bersandar pada moralitas agama dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

1. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
2. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
3. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta
4. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/ matrik seperti contoh berikut :

Tabel
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
*Desa.....

| Visi: Terciptanya Desa Bersih, Hijau dan Produktif | | |
|--|--|--|
| Misi | Tujuan | Sasaran |
| Misi 1: Mewujudkan Desa Bersih | Tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan kumuh yang ada diseluruh dusun 2. Fasilitas publik desa bersih 3. Sungai dan drainase bersih 4. Seluruh rumah warga memiliki fasilitas MCK dan Pengolahan limbah yang baik 5. Dsb..... |
| Misi 2. Mewujudkan desa hijau | Tujuan untuk mewujudkan desa yang asri dan nyaman | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh halaman rumah warga memiliki pohon pelindung 2. Seluruh fasilitas publik desa memiliki pohon 3. Seluruh hutan yang rusak dapat direhabilitasi dengan baik dan berkelanjutan 4. Dsb..... |
| Misi 3. Mewujudkan desa yang produktif | Tujuan : untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kelompok tani dapat mengelola usahanya dengan baik dan sukses. 2. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura 3. Akses jalan ke lahan pertanian warga mudah dan lancar. 4. Seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah dengan baik 5. Seluruh warga mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah. 6. Dsb..... |
| | | |

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Desa...

Berdasarkan tabel diatas perlu dijelaskan hubungan setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan isu strategis desa (hubungkan dengan bab IV)

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Penyajian strategi dan arah kebijakan, sekurang-kurangnya disajikan dalam contoh tabel berikut.

Tabel
Strategi, Arah dan Kebijakan
Desa.....*)

| | | | |
|---|---------|----------|----------------|
| VISI : Terciptanya Desa Bersih, Hijau dan Produktif | | | |
| MISI I : Mewujudkan Desa Bersih | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |

| VISI : Terciptanya Desa Bersih, Hijau dan Produktif | | | |
|---|--|--|--|
| MISI I : Mewujudkan Desa Bersih | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat | 1. Lingkungan kumuh yang ada diseluruh dusun tertata baik | 1. Meningkatkan kualitas data dan informasi kawasan kumuh | 1. Penyediaan data base kawasan kumuh |
| | | 2. Memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten | 2. Pembangunan infrastruktur penunjang kebersihan lingkungan |
| | | 3. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan | 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan kawasan yang bersih |
| | | | |
| | 2. Fasilitas publik desa bersih | 1. Meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat 2. Menyediakan sarana dan prasarana persampahan | 1. Pengembangan budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan 2. Penyediaan bak-bak sampah dan pengelola sampah 3 R |
| | 3. Sungai dan drainase bersih | Dst... | Dst... |
| | 4. Seluruh rumah warga memiliki fasilitas MCK dan Pengolahan limbah yang baik | Dst.. | Dst.... |
| MISI II: Mewujudkan desa hijau | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| untuk mewujudkan desa yang asri dan nyaman | 1. Seluruh halaman rumah warga memiliki pohon pelindung 2. Seluruh fasilitas publik desa memiliki | <i>Dilanjutkan seperti cara mengisi format diatas.</i> | <i>Dilanjutkan seperti cara mengisi format diatas.</i> |

| VISI : Terciptanya Desa Bersih, Hijau dan Produktif | | | |
|---|--|----------|----------------|
| MISI I : Mewujudkan Desa Bersih | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| | pohon 3. Seluruh hutan yang rusak dapat direhabilitasi dengan baik dan berkelanjutan 4. Dsb..... | | |

Berdasarkan tabel diatas, selanjutnya diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pada bagian ini diuraikan program prioritas pemerintah desa yang diramu dari visi dan misi kepala desa serta berpedoman pada permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Contohnya, jika mengacu pada permasalahan pada bab IV, maka program prioritas desa adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
3. Pemerataan infrastruktur dasar
4. Pengembangan lingkungan dan kehutanan
5. Pengembangan keagamaan, budaya dan adat istiadat
6. Dst....

Selanjutnya program prioritas desa agar diakomodir dalam setiap rumusan tujuan yang telah ada dan didetailkan dengan program yang sesuai indikatornya, seperti pada contoh tabel berikut :

Contoh Tabel...
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa 2015 s/d 2020
Desa.....*)

Tujuan 1: untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

| No | Sasaran | Strategi dan Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Desa |
|-----|--|---|---|------------------|--------------------|---|
| | | | | Kondisi 2015 | Kondisi 2020 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Lingkungan kumuh yang ada diseluruh dusun tertata baik | 1. Meningkatkan kualitas data dan informasi kawasan kumuh | Persentase data dan informasi kawasan kumuh | 0% 1 Unit | 60% 11 Unit | Program Pengembangan data dan informasi |

| | | | | | | |
|--|---------|---|---|---------|---------|---------------------------------|
| | | 2. Memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten | 1. Jumlah fasilitas persampahan yang dibangun | 0 Unit | 36 unit | Program pengelolaan persampahan |
| | | | 2. Jumlah rumah sehat yang dibangun | 0 unit | 60 unit | Program pengembangan perumahan |
| | | 3. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan | 3. Jumlah rumah sehat yang direhab | | | |
| | | | 4. Dsb | | | |
| | | | ----- | | | |
| | | | - | | | |
| | Dst.... | Dst.... | Dst.... | Dst.... | Dst.... | Dst.... |
| | Dst... | Dst... | Dst... | Dst... | Dst... | Dst... |
| | Dst.... | Dst.... | Dst.... | Dst.... | Dst.... | Dst.... |

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Desa.

Untuk memudahkan pengisian program pembangunan desa sebagaimana kolom 7 (tujuh) tabel tersebut diatas, dibawah ini disajikan beberapa rumusan program yang bisa dipedomani sesuai dengan indikator sasaran yang dibuat.:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik
 - a. Program Pelayanan administrasi perkantoran
 - b. Program Pengembangan data dan informasi
 - c. Program Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - d. Program Perencanaan dan Penganggaran
 - e. Program Penyusunan Dokumen Pelaporan
 - f. Program Monitoring dan Evaluasi
 - g. Program Pengembangan Komunikasi dan Infomasi
 - h. Pogram Peningkatan SDM Aparatur Desa
 - i. Program Peningkatan peran BPD
 - j. Program Peningkatan peran Kelembagaan Desa
 - k. Program Kerjasama Antar Desa
 - l. Program Kerjasama pihak ketiga

- m. Dst.....
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
 - a. Program Pelayanan Kesehatan Desa
 - b. Program Sanitasi lingkungan
 - c. Program MCK
 - d. Program Kebersihan Lingkungan
 - e. Program pelayanan pendidikan
 - f. Program Pengembangan taman bacaan/perpustakaan
 - g. Program Pengembangan Sanggar Belajar Masyarakat
 - h. Program Pemberdayaan Masyarakat
 - i. Program Pengembangan Sarana Produksi Pertanian
 - j. Program Pengembangan Usaha Produktif
 - k. Program Perlindungan perempuan dan Anak
 - l. Program Keluarga Berencana
 - m. Program Olahraga
 - n. Program Kepemudaan
 - o. Dsb....
 3. Pemerataan infrastruktur dasar
 - a. Program Pelayanan air bersih
 - b. Program Pengembangan Listrik
 - c. Program Perumahan
 - d. Program Jalan dan jembatan
 - e. Program Pengendalian Sumber Daya Air
 - f. Program Kawasan Kumuh
 - g. Program Pengembangan Pasar Desa
 - h. Program Infrastruktur perikanan
 - i. Program Infrastruktur Perhubungan
 - j. Program Drainase
 - k. Program komunikasi dan informasi
 - l. Dsb...
 4. Pengembangan lingkungan dan kehutanan
 - a. Program Pengelolaan sugai dan danau
 - b. Program Penghijauan desa
 - c. Program Rehabilitasi hutan
 - d. Program Penyuluhan
 - e. Program Infrastruktur Kehutanan
 - f. Program penyuluhan/pelatihan
 - g. Program Pengelolaan Persampahan
 - h. Program Prasarana Persampahan
 - i. Program Ruang Terbuka Hijau Desa
 - j. Program Taman Desa.

- k. Program Pelestarian Lingkungan
- l. Dsb.....
- 5. Pengembangan keagamaan, budaya dan adat istiadat
 - a. Program STQ tingkat desa
 - b. Program Baca Tulis Quran
 - c. Program Pemakmuran Mesjid
 - d. Program Pengembangan Budaya dan Adat istiadat
 - e. Program Kurukunan Antar Umat Beragama
 - f. Program lintas budaya
 - g. Dsb.....

Permusan program sangat terkait dengan pengkajian permasalahan desa yang diperoleh dari setiap dusun.

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DESA

Pada bagian ini, setiap program dan indikator yang telah dirumuskan pada Bab VII, disajikan kembali pada bab ini dengan rincian target tahunan sebagaimana contoh tabel berikut ini.

Contoh Tabel
Indikasi Rencana Program Prioritas Tahun 2015 - 2020
Desa.....*)

| Kode | Uraian | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 14) | Target Kinerja Program | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
|--------|---|---|---------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | | Tar get | Sat uan | Tar get | Sat uan | Tar get | Sat uan | tar get | Sat uan | tar get | Sat uan | Tar get | Sat uan | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 100111 | Program Pengembangan Data dan Informasi | Persentase data dan informasi kawasan kumuh | 0% | 0 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 60 | % |
| 100211 | Program pengelolaan persampahan | Jumlah fasilitas persampahan yang dibangun | 0 | 1 | Unit | 2 | Unit | 2 | Unit | 2 | Unit | 2 | Unit | 2 | Unit | 11 | Unit |

| Kode | Uraian | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 14) | Target Kinerja Program | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | |
|-------|--------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---------|
| | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | |
| | | | | Target | Satuan | Target | Satuan | Target | Satuan | Target | Satuan | Target | Satuan | Target | Satuan | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
| 10022 | Program pengembangan perumahan | 1. Jumlah rumah sehat yang dibangun 2. Jumlah rumah sehat yang direhab | 06 | Unit | 06 | Unit | 06 | Unit | 06 | Unit | 06 | Unit | 06 | Unit | 06 | Unit | 36 Unit |
| | | | 30 | 10 | Unit | 10 | unit | 10 | unit | 10 | unit | 10 | unit | 10 | unit | 10 | 60 unit |
| 103 | Dst | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Desa

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DESA

Penetapan indikator kinerja desa bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala desa pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan desa setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja desa dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja desa selanjutnya disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut

| No. | INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH Desa | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | Thn 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 18 | Perkembangan modal usaha BUMDes | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... |
| 19 | Jumlah kegiatan keagamaan | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... |
| 20 | Jumlah kegiatan budaya dan adat istiadat | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... |
| 21 | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... | Dst..... |

*) Seluruh informasi di kolom 2 disesuaikan dengan visi dan misi kepala desa dan berpedoman pada data BAB II.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang perlu dirumuskan dalam bagian ini antara lain:

10.1. Pedoman Transisi:

Dalam bagian ini perlu dinyatakan bahwa RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan RKP Desa dan RAPB Desa tahun pertama dibawah kepemimpinan desa terpilih hasil pemilihan umum kepala desa (pilkades) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKP Desa setelah RPJM Desa berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Desa dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKP Desa masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Desa dari Kepala desa terpilih hasil pilkades pada periode berikutnya.

10.2. Kaidah Pelaksanaan:

RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala desa terpilih merupakan pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun RKP Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Desa dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Desa, Bappeda agar melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

Kepala Bappeda,

.....

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

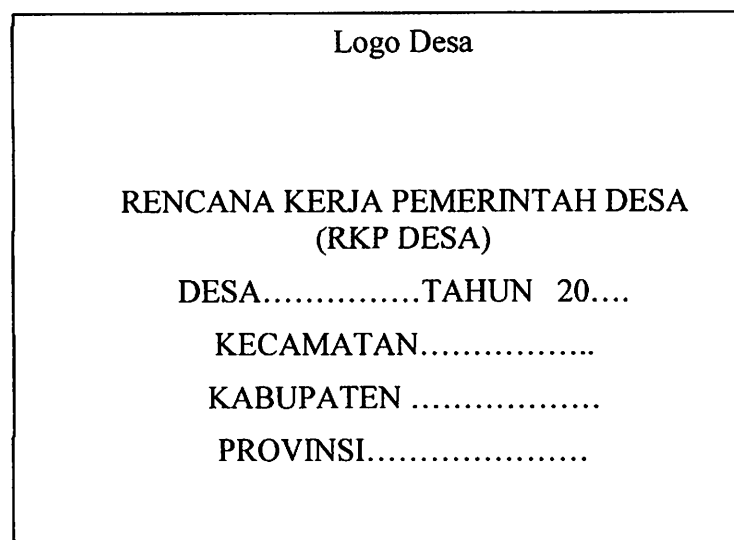
**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA KABUPATEN
POHUWATO**

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

1. Halaman Depan RKP Desa

Pada halaman depan (cover) RKP Desa Desa memuat informasi seperti contoh berikut.

Contoh Format



2. Sistematika RPJMDesa terdiri desa adalah sebagai berikut :

Halaman Judul

Peraturan Desa tentang RKP Desa

Kata Pengantar

Daftara Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Gambaran Umum Capaian Kinerja Pemerintah Desa Tahun Sebelumnya dan Perkiraan tahun berjalan

Bab III. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bab IV. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Desa.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Desa

Bab VI. Penutup

Lampiran-Lampiran :

3. Secara teknis penyusunan bab per bab adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Contoh narasi

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang berkualitas merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan baik pada skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dipotret dari sejauh mana optimalisasi rencana yang dihasilkan mampu mengakomodir aspirasi masyarakat, dan hal ini sesuai dengan target perencanaan jangka menengah daerah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi. Menjadi sebuah keharusan daerah untuk memiliki dokumen perencanaan baik rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk perencanaan 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk perencanaan 5 tahun dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) untuk perencanaan tahunan (1 tahun), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Amanat undang-undang tersebut, dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah kemudian pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut telah dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan daerah, yakni RPJPD Kabupaten Pohuwato 2009-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011. Dan RPJMD Kabupaten Pohuwato (2010-2015) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2011; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut disusun dengan mengacu pada RPJPD 2009-2025, yang pada hakekatnya memuat visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih. Visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih, kemudian dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). RPJMD akan

dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu substansi penting dalam RPJMD Kabupaten Pohuwato 2010-2015 adalah adanya pentahapan dan penetapan tema yang menjadi target tahunan. Setiap tema mewakili prioritas pembangunan tiap tahun yang menjadi pijakan utama terhadap penganggaran pada tahun tersebut. RKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 merupakan tahun kelima perencanaan sesuai RPJMD 2010-2015, dengan mengusung tema "Memantapkan ekonomi rakyat yang ditunjang dengan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat". RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKP Desa

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala Desa tentang pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. Orientasi mengenai RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKP Desa;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan desa

2. Penyusunan rancangan awal RKP Desa

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKP Desa, aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKP Desa.

- a. Perumusan rancangan awal RKP Desa dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengolahan data dan informasi.
 - 2) Analisis gambaran umum kondisi desa.
 - 3) Analisis ekonomi dan keuangan desa.
 - 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
 - 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten.
 - 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran BPD
 - 7) Perumusan permasalahan pembangunan Desa

3. Pelaksanaan Musrenbang Desa

Musrenbang RKP Desa dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKP Desa. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :

- a. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga.
 - c. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato.
 - d. Rencana program, kegiatan, yang diusulkan ke Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato serta pihak ketiga.
4. Perumusan Rancangan Akhir RKP Desa

Dalam penyusunan rancangan akhir RKP Desa yang menjadi acuan tim penyusun adalah hasil pembahasan pada pra musrenbang yang kemudian dibawa ke musrenbang RKP Desa untuk dibuatkan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKP Desa.

5. Penetapan RKPD Kabupaten Pohuwato

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan evaluasi dari pemerintah kabupaten melalui Bappeda

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun landasan hukum yang terkait dengan penyusunan RKPD tahun 2014 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Teknis Pelaksanaan Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025.

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKP Desa ini merupakan penjabaran dari RPJM Desa tahun 2015 – 2021 dan juga mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Desa. Selain dokumen RKP Desa ini terkait erat dengan dokumen RKPD Kabupaten Pohuwato tahun 2016, dokumen.....dst.....

1.4 Sistematika Dokumen RKP Desa

Dokumen RKP Desa tahun 2016 ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP Desa TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2015

2.1 Gambaran Umum Kondisi dESA

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2 Topografi

2.1.3 Klimatologi

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.5 Wilayah Rawan Bencana

2.16 Demografi

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Desa Sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJM DESA

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial

2.2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

3.1.....

3.2.....

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Visi dan Misi

4.1.2 Tujuan dan Sasaran

4.1.3 Prioritas dan Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA

5.1.....

5.2.....

BAB VI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan dokumen RKP Desa ini adalah untuk mengarahkan dan mensinergikan program pembangunan desa tahun 2016 . Sedangkan tujuannya adalah :

1. Untuk memfokuskan program pembangunan desa yang dilaksanakan dalam periode satu tahun berdasarkan target-target RPJM Desa 2015-2021.
2. Sebagai acuan penyusunan APB Desa
3. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan kabupaten, provinsi dan pusat.

I. GAMBARAN UMUM CAPAIAN KINERJA TAHUN 20... DAN PERKIRAAN TAHUN 20....

2.1 Gambaran Umum Kondisi desa

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2 Topografi

2.1.3 Klimatologi

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.5 Wilayah Rawan Bencana

2.1.6 Demografi

(Narasi pada poin-poin diatas diambil dari data RPJM Desa dengan catatan datanya diisi dengan data terbaru yakni sampai satu tahun sebelum tahun rencana. Contoh tampilkan data tahun 2014 sebagai dasar perencanaan tahun 2015.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKP Desa Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJM Desa

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Contoh Pengisian)

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---------------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Jumlah penduduk yang miskin | | | | |
| 2 | Angka kriminalitas yang terjadi | | | | |

Ket. T = Target. R= Realisasi. P = Perkiraan

2.1.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 3 | Jumlah penduduk yang buta huruf | | | | |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | | | | |
| 5 | Persentase balita gizi buruk | | | | |
| 6 | Persentase penduduk yang memiliki lahan | | | | |
| 7 | Persentase penduduk yang bekerja | | | | |

2.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|--------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 8 | Jumlah grup kesenian | | | | |
| 9 | Jumlah gedung olahraga | | | | |
| 10 | Jumlah klub olahraga | | | | |
| 11 | Jumlah lapangan olahraga | | | | |

2.2. Aspek Pelayanan Umum

2.2.1. Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|--|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Jumlah Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) | 2010 | | | |
| 2 | Angka Partisipasi Murni PAUD/TK | 2010 | | | |

b. Pendidikan Dasar

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata PAUD/TK | | | | |
| 2 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD sederajat | | | | |
| 3 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | | | | |
| 4 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | | | | |
| 5 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | | | | |
| 6 | Sekolah pendidikan PAUD/TK kondisi bangunan baik | | | | |

c. Pendidikan Menengah

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Angka Putus Sekolah SMA Sederajat | 2014 | | | |
| 2 | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 2014 | | | |

2.2.2. Kesehatan

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|--|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Jumlah Posyandu | 2014 | | | |
| 2 | Jumlah kunjungan Bayi/balita ke posyandu | 2014 | | | |
| 3 | Jumlah kunjungan ibu hamil ke posyandu/puskesmas/Pustu | 2014 | | | |
| 4 | Jumlah bidan desa | 2014 | | | |
| 5 | Jumlah Balita Gizi Buruk | 2014 | | | |
| 6 | Jumlah gizi buruk mendapat perawatan | 2015 | | | |
| 7 | Jumlah balita gizi kurang | 2014 | | | |
| 8 | Jumlah balita gizi kurang yang mendapat perawatan | 2014 | | | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|------|--|--|--|
| 9 | Jumlah RT memiliki Jamban | 2014 | | | |
| 10 | Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) | 2014 | | | |
| 11 | Jumlah angka kematian ibu (AKI) | 2014 | | | |

2.2.3. Pekerjaan Umum

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km) | | | | |
| 2 | Persentase rumah belum layak huni | | | | |
| 3 | Panjang jalan dilalui Roda 4 (km) | | | | |
| 4 | Luas Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar | | | | |
| 5 | Luas Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | | | | |
| 6 | Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | | | | |
| 7 | Luas Lingkungan Pemukiman kumuh | | | | |
| 8 | Jumlah Rumah Tangga yang Tersedia Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari | | | | |
| 9 | Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada | | | | |
| 10 | Tersedianya Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 liter/orang/hari | | | | |
| 11 | Rumah Tangga yang Tersedia Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai | | | | |

2.2.4. Perencanaan Pembangunan

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|--|----------------------------------|--------|------------|--------|
| 1 | Tersedianya dokumen Perencanaan RPJM Desa yang telah di perdeskan | 3 Bulan Setelah pelantikan kades | | | |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKP Desa yang diperdeskan/perkades | Bulan Juli | | | |
| 3 | Tersedian Dokumen APB Desa yang ditetapkan dengan perdes | Bulan oktober | | | |
| 4 | Tersedia dokumen LKPJ Kepala Desa | Bulan maret | | | |
| 5 | Tersedia dokumen LPP Desa | Bulan Maret | | | |

2.2.5. Pertanian

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Persentase Rumah tangga yang memiliki lahan bersertifikat | | | | |
| 2 | Persentase Rumah tangga yang tidak memiliki tanah sebagai lahan pertanian/usaha | | | | |

2.2.6. Kependudukan dan Catatan Sipil

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| | Persentase penduduk yang ber KTP Nasional | | | | |
| | Persentase bayi berakte kelahiran | | | | |
| | Persentase pasangan berakte nikah | | | | |

2.2.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|--|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | | | | |
| 2 | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | Jumlah tenaga kerja perempuan | | | | |
| 4 | Jumlah kasus kekerasan pada anak | | | | |

2.2.8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|------------------------------------|--------|--------|------------|--------|
| | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2014 | | | |
| | Jumlah peserta KB Aktif | 2014 | | | |
| | Jumlah petugas KB | 2014 | | | |

2.2.9. Sosial

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Persentase anak cacat yang memperoleh bantuan | 2014 | | | |
| 2 | Persentase lansia yang memperoleh bantuan | 2014 | | | |
| 3 | Persentase warga miskin yang mendapat bantuan | 2014 | | | |

Jika ada masalah sosial lainnya bisa ditambahkan pada format ini.

2.2.10. Ketenaga Kerjaan

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Jumlah penganggur | 2014 | | | |
| 2 | Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja per tahun | 2014 | | | |

2.2.11. Koperasi, Usaha kecil Dan Menengah.

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Persentase koperasi aktif | 2014 | | | |
| 2 | Jumlah UMKM | 2014 | | | |

2.2.12. Kebudayaan

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 2014 | | | |
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 2014 | | | |

2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|----------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Jumlah organisasi pemuda | 2014 | | | |
| 2 | Jumlah organisasi olahraga | 2014 | | | |
| 3 | Jumlah kegiatan kepemudaan | 2014 | | | |
| 4 | Jumlah kegiatan olahraga | 2014 | | | |
| 5 | Jumlah Lapangan olahraga | 2014 | | | |

2.2.14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|--|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 2014 | | | |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Desa | 2014 | | | |
| 3 | Rata-rata Presentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | 2014 | | | |
| 4 | Jumlah lembaga yang terbentuk untuk Pemeliharaan/keberlanjutan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | 2014 | | | |

2.2.15. Statistik

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|------------------|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Buku Profil desa | | | | |
| 2 | | | | | |

2.2.16. Komunikasi dan Informatika

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Persentase jangkauan jaringan komunikasi HP/Telpon | | | | |
| 2 | Jumlah warnet | | | | |
| 3 | Jumlah surat kabar nasional/local | | | | |
| 4 | Jumlah penyiaran radio/TV local | | | | |
| 5 | Website milik pemerintah desa | | | | |
| 6 | Persentase Rumah Tangga yang terjangkau TV/TV Kabel | | | | |
| 7 | Persentase Rumah tangga yang menikmati siaran radio | | | | |

Urusan Pilihan

1. Pertanian/Perikanan/Perkebunan/Peternakan

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|--|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Produksi Jagung (ton) | | | | |
| 2 | Dsb....(produksi komoditi sesuai potensi desa) | | | | |
| 3 | Jumlah kelompok tani jagung | | | | |
| 4 | Dsb....(Jumlah kelompok sesuai potensi desa) | | | | |

2. Kehutanan

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|-------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Kerusakan Kawasan Hutan | | | | |

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|--|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Pertambangan tanpa ijin | | | | |
| 2 | Jumlah rumah tangga yang belum menikmati listrik | | | | |

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|--|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | | | | |

2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|---|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Luas wilayah produktif | | | | |
| 2 | Luas wilayah industri | | | | |
| 3 | Luas wilayah banjir | | | | |
| 4 | Luas wilayah kekeringan | | | | |
| 5 | Luas wilayah perkotaan | | | | |
| 6 | Jenis dan jumlah bank dan cabang | | | | |
| 7 | Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang | | | | |
| 8 | Jenis, kelas, dan jumlah restoran | | | | |
| 9 | Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel | | | | |
| 10 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | | | | |

2.3.3. Fokus Sumber Daya Manusia

| No | Indikator | T 2014 | R 2014 | Prosentase | P 2015 |
|----|-----------------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Persentase jumlah warga lulus SMA | | | | |
| 2 | Persentase jumlah warga lulus S1 | | | | |
| 3 | Persentase jumlah warga lulus S2 | | | | |

BAB III. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja ini dapat diuraikan dalam bentuk contoh format dibawah ini

a. Pendapatan

| NO | URAIAN | Target 2014 | Realisasi 2014 | % |
|----|---|---------------|----------------|-----|
| 1 | PENDAPATAN ASLI DESA | Rp 2.100.000 | Rp 2.100.000 | 100 |
| | 1.1. Hasil Usaha Desa | | | |
| | 1.2. Hasil Kekayaan Desa | | Rp 3.700.000 | |
| | 1.3. Hasil swadaya dan partisipasi | | Rp 3.700.000 | |
| | 1.4. Hasil Gotong Royong | | | |
| | 1.5. Lain-lain Pend. Asli Desa. | Rp 750.000 | Rp 800.000 | |
| | Jumlah | | | |
| 2 | BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN | | | |
| | (1,0 % dari Retribusi Kabupaten) | 0 | 0 | |
| 3 | DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH (ADD) | Rp150.000.000 | Rp 210.000.000 | |
| 4 | BANTUAN KEUANGAN | | | |
| | 1.1. Bantuan Pemerintah Pusat | | | |
| | 1.2. Bantuan Pemerintah Provinsi | | | |
| | 1.3. Bantuan Pemerintah Kabupaten | Rp100.000.000 | Rp150.000.000 | |
| | Jumlah | | | |
| 5 | HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA | | | |
| | 5.1. Hibah | | | |
| | 5.2. Sumbangan Pihak Ketiga | | | |
| | Jumlah | | | |
| | TOTAL JUMLAH | 250.000.000 | 300.000.000 | |

b. Belanja

Kebijakan belanja desa dapat dilihat dari pelaksanaan APBD untuk tahun sebelumnya seperti dapat dilihat pada contoh tabel berikut :

| Tahun Anggaran | Jenis Belanja | Jml Pagu | Realisasi | % |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|------|
| 2014 | Belanja langsung | Rp 61.650.000 | Rp 61.650.000 | 100% |
| | Belanja Tdk Langsung | Rp 41.100.000 | Rp 41.100.000 | 100% |
| | Jumlah | Rp 102.750.000 | Rp 102.750.000 | 100% |

3.2. Kerangka Pendanaan Kedepan

Kerangka pendanaan sangat menentukan proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 . Proyeksi Kerangka pendanaan kedepan dapat berpijak dari kinerja keuangan desa sebelumnya.

a. Pendapatan

Contoh Tabel

Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
tahun 2015

| NO | URAIAN | TAHUN 2015 |
|----|--|----------------|
| 1 | PENDAPATAN ASLI DESA | Rp 2.100.000 |
| | 1.6. Hasil Usaha Desa | |
| | 1.7. Hasil Kekayaan Desa | |
| | 1.8. Hasil swadaya dan partisipasi | |
| | 1.9. Hasil Gotong Royong | |
| | 1.10. Lain-lain Pend. Asli Desa. | Rp 750.000 |
| | Jumlah | 2.850.000 |
| 2 | BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN (1,0 % dari Retribusi Kabupaten) | |
| 3 | DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH (ADD) | Rp.800.000.000 |
| 4 | BANTUAN KEUANGAN | |
| | 1.4. Bantuan Pemerintah Pusat | |
| | 1.5. Bantuan Pemerintah Provinsi | |
| | 1.6. Bantuan Pemerintah Kabupaten | |
| | Jumlah | Rp 300.000.000 |
| | Jumlah | 1.100.000.000 |
| 5 | HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA | |
| | 5.1. Hibah | 5.000.000 |
| | 5.2. Sumbangan Pihak Ketiga | |
| | Jumlah | 5.000.000 |
| | TOTAL JUMLAH | 1.107.850.000 |

a. Belanja

Kebijakan belanja tahun 2015 dilihat pada tabel berikut :

| Tahun Anggaran | Jenis Belanja | Pagu Anggaran |
|----------------|----------------------|----------------|
| 2016 | Belanja langsung | Rp 61.650.000 |
| | Belanja Tdk Langsung | Rp 41.100.000 |
| | Jumlah | Rp 102.750.000 |

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas dan sasaran Pembangunan diambil langsung dari dokumen RPJM Desa. Pada bab ini akan disajikan keterkaitan Visi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMD tersebut dan prioritas pembangunan yang akan direncanakan pada setiap tahun anggaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

Untuk tujuan dan sasaran pembangunan dan keterkaitannya dengan Visi dan misi Pemerintah Desa disajikan pada tabel. Contoh Tabel adalah sebagai berikut :

Contoh Tabel

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Desa

| No | Visi/Misi | Tujuan | Sasaran |
|----|--|--|--|
| 1 | <p><i>VISI :</i></p> <p>.....</p> <p><i>MISI :</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>1. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.</p> <p>2.dst...</p> | <p>a. Seluruh desa menerapkan sistem pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel</p> <p>b.dst....</p> <p>a.....</p> |

Catatan : Semua isi kolom ini diambil dari RPJM Desa

4.2. Prioritas Pembangunan Desa

Tahapan prioritas pembangunan berdasarkan target pencapaian RPJM Desa disajikan dalam bentuk tabel. Contoh tabel adalah sebagai berikut :

Contoh

Prioritas Pembangunan Desa Tahun 20....

| Program Prioritas RPJMD 2015- 2021 | Urutan Program Prioritas RKP Desa Tahun... |
|--|--|
| <p>1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik</p> <p>2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat</p> <p>3. Pemerataan infrastruktur dasar</p> <p>4. Pengembangan lingkungan dan kehutanan</p> <p>5. Pengembangan keagamaan, budaya dan adat istiadat</p> <p>6. Dst....</p> | <p>1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat</p> <p>2. Pengembangan lingkungan dan kehutanan</p> <p>3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik</p> <p>4. Pemerataan infrastruktur dasar</p> <p>5. Pengembangan keagamaan, budaya dan adat istiadat</p> <p>6. Dst....</p> |

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka secara detailnya keterkaitan antara program prioritas RKP Desa 2015 dan target kinerja berdasarkan RPJM Desa tahun disajikan pada tabel. Contoh Tabel adalah sebagai berikut

Contoh Tabel

Program Prioritas Pembangunan Desa dan Target Kinerja

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat

| No | Program | Indikator Kinerja Program berdasarkan RPJM Desa (Outcome) | Target Tahun 2015 | Sumber Anggaran |
|----|--------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Pengembangan Komoditi jagung | Jumlah Kelompok tani yang diberi bantuan (Kel) | 50 | APBD Kab |
| 2 | Pengembangan Saprodi Pertanian | Jumlah kelompok yang dibantu (Kel) | 100 | APBD Provinsi |
| 3 | Dan seterusnya.... | | | |

2. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik

| No | Program | Indikator Kinerja Program berdasarkan RPJM Desa (Outcome) | Target Tahun 2015 | Sumber Anggaran |
|----|------------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Presentase Realisasi APB Desa | 95% | APB Desa |
| 2 | Dan seterusnya.... | | | |

Catatan : Sumber Anggaran disesuaikan dengan kewenangan pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan pusat

Kolom indikator dan target kinerja 2015 diambil dari RPJM Desa

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 20.....

(Contoh Redaksi)

Berdasarkan program prioritas RPJM Desa dan hasil musrenbang desa tahun 2015, maka program dan kegiatan prioritas tahun 2016 disajikan masing-masing sebagai berikut :

- a. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagaimana pada lampiran 1.

Berdasarkan lampiran tersebut, terdapat sejumlah....program dankegiatan dengan total Anggaran Rp.....

- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga sebagaimana lampiran 2.

Berdasarkan lampiran tersebut, terdapat sejumlah....program dankegiatan dengan total Anggaran Rp.....

- c. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana lampiran 3.

Berdasarkan lampiran tersebut, untuk tingkat kabupaten terdapat sejumlah....program dankegiatan dengan total Anggaran Rp..... Untuk tingkat provinsi, terdapat sejumlah....program dankegiatan dengan total Anggaran Rp.....dan untuk tingkat pusat, terdapat sejumlah....program dankegiatan dengan total Anggaran Rp.....

- d. Daftar Usulan RKP Desa yakni Rencana program, kegiatan, yang diusulkan ke Pemerintah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato serta pihak ketiga sebagaimana lampiran 4.

Berdasarkan lampiran 4 tersebut, untuk tingkat kabupaten terdapat sejumlah....program dankegiatan. Untuk tingkat provinsi, terdapat sejumlah....program dankegiatan.

Keterangan : NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR AGAR SAMA DENGAN PRIORITAS PROGRAM YANG DISAJIKAN PADA BAB IV bagian 4.2. Prioritas Pembangunan Desa

Lampiran 2.

Contoh Format.

Matriks Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar-Desa Dan Pihak Ketiga Tahun 2016 DesaKecamatan....

| N O | PROGRAM KEGIATAN | | INDIKATOR PROGAM (OUTCOME DAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA | | SASARAN / TARGET KINERJA | LOKASI KEGIATA N | Pagu Indikatif (RP.000) | | | |
|--------|---|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | | Desa A | Desa B | Pihak Ketiga | Jumlah |
| 1 | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | | Persentase wilayah yang memiliki akses jalan dan jembatan. | | 98,03% | Kantor Desa | | | | |
| | 1 | Pemban gunan jalan usaha tani | Input | Dana | | Desa A dan Desa B | 250.000 | 250.000 | - | 500.000 |
| | | | Output | Panjang jalan | 500 Mtr | | | | | |
| | | | Out Come | Meningkatny a akses jalan ke sentra produksi jagung | 100 Ha | | | | | |
| | | | Presenta se | 20% | | | | | | |
| | 2 | Pemban gunan Jembata | Input | Dana | | Desa A dan Desa B | | | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--------------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | n | | | | | | | |
| | | | Output | Volume jembatan | Pj. 6 x 3 lbr | | | | |
| | | | Outcome | Lancarnya arus kendaraan | 100% | | | | |
| | | | Prosentase | 20% | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Keterangan : NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR AGAR SAMA DENGAN PRIORITAS PROGRAM YANG DISAJIKAN PADA BAB IV bagian 4.2. Prioritas Pembangunan Desa

Lampiran 3

Contoh Format.

Matriks Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 DesaKecamatan....

| NO | PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME DAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA | SASARAN / TARGET KINERJA | LOKASI KEGIATAN | Pagu Indikatif (RP.000) | | | |
|----|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------|-------|--------|
| | | | | | Kabupaten | Provinsi | Pusat | Jumlah |
| 1 | Program Pengembangan Perumahan | Jumlah rumah yang dibangun | 100 Rumah | Desa A. | | | | |
| 1 | Pembangunan Rumah Sehat | Input Dana | | Dusun A dan B | 60.000 | - | - | 60.000 |
| | | Output | Jumlah Rumah | 3 Unit | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|---|--------|-------------------|--------|---|---|--------|
| | | | Out Come | Tersedinya rumah sehat bagi rumah tangga miskin | 3 Unit | | | | | |
| | | | Present ase | 20% | | | | | | |
| | 2 | Rehab rumah | Input | Dana | | Desa A dan Desa B | 60.000 | - | - | 60.000 |
| | | | Output | Jumlah rumah direhab | 6 Unit | | | | | |
| | | | Outcome | Tersedianya rumah sehat bagi warga miskin | 6 Unit | | | | | |
| | | | Prosentase | 20% | | | | | | |

Keterangan : NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR AGAR SAMA DENGAN PRIORITAS PROGRAM YANG DISAJIKAN PADA BAB IV bagian 4.2. Prioritas Pembangunan Desa

Lampiran 4

Contoh Format Daftar Usulan RKP Desa

Matriks Rencana program, kegiatan, yang diusulkan Pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten Pohnuato serta pihak ketiga Tahun 2016 DesaKecamatan....

| N O | PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR PROGAM (OUTCOME DAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) KINERJA | TARGET KINERJA | LOKASI KEGIATAN | SKPD Terkait |
|-----|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Program Jalan dan Jembatan | Presentase jalan dan jembatan akses pemukiman dan sentra produksi | 70 % | Desa A | |
| 1 | Pembangunan jalan usaha | Input Dana | | Dusun B | PU Provinsi Gorontalo |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|
| | | tani | | | | |
| | | | Output | Panjang jalan | 1 Km | Dusun B |
| | | | Out Come | Optimalnya pemanfaatan lahan | 200 Ha | Dusun B |
| | | | Present ase | 20% | | |
| | 2 | Rehab jembatan | Input | Dana | | Dusun B Kementrian Pekerjaan Umum |
| | | | Output | Jumlah jembatan direhab | 1 Unit | |
| | | | Outcome | Lancarnya arus barang dan jasa | 100% | |
| | | | Prosentase | 20% | | |

Keterangan : NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR AGAR SAMA DENGAN PRIORITAS PROGRAM YANG DISAJIKAN PADA BAB IV bagian 4.2. Prioritas Pembangunan Desa

II. PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada RPJM DesaTahun 2015 – 2021. Selain itu, dokumen ini pula disusun dengan mengacu pada pencapaian target kabupaten pohnoro berdasarkan RKP Desa Tahun 2016.

Dokumen RKP Desa disusun sebagai landasan utama pemerintah desa dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan desa pada tahun 2016. Agar dokumen ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Penyusunan APB Desa harus berpedoman pada dokumen ini.
2. Sebagai masukan dan acuan pemerintah kabupaten, provinsi, pusat dan pihak ketiga dalam mengintervensi pembangunan di desa.....

Desa.....2...
Kepala Desa

TTD dan Cap
(.....)